

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Tunisia dan Indonesia pertama kali melakukan kontak bilateral pada tahun 1951, ketika Komite Solidaritas untuk Afrika Utara dibentuk yang bertujuan untuk mendukung kebebasan negara-negara Maghribi. Kunjungan Presiden Indonesia pada Noyember 1993 telah memberikan daya dorong yang kuat pada hubungan bilateral yang telah terjalin serta meningkatkan kerjasama kedua negara. Di bidang ekonomi, Ben Ali membuka jalan kearah swastanisasi sektor umum, mendorong perusahaan bebas dan mengijinkan pembentukan perusahaan-perusahaan perdagangan internasional. Dari 1987 hingga 1993, peraturan investasi diperbaiki dua kali, untuk menarik investasi yang terutama dari Eropa dan Timur Tengah. Langkah-langkah ini dimaksudkan Ben Ali untuk memberi citra baru bagi Tunisia, sebagai negara berorientasi pasar dan surga bagi investasi.

Dalam kerjasama ekonomi, Indonesia-Tunisia menjadi mitra sejak 1970an, ketika Indonesia mulai membeli pupuk untuk memenuhi kebutuhan beras yang meningkat. Sedangkan Tunisia mengimpor kopi, tembakau, tekstil dan karet.

14

1989 dengan nilai 60 juta dollar. Tetapi kemudian merosot lagi menjadi sekitar 30 juta dollar.¹

Kerjasama yang dapat dilakukan tidak hanya bersifat bilateral, tapi juga trilateral sebagaimana yang dilakukan Tunisia dengan beberapa negara lainnya, misalnya Tunisia-Indonesia-negara di afrika, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali mengusulkan diadakannya suatu "Council of Businessmen" yang mempunyai tugas untuk membahas, mengkaji, dan menentukan bidang-bidang apa saja yang berpeluang dilakukan suatu kerjasama bilateral.²

Oleh karena itulah menimbang dari uraian singkat di atas, maka penulis mengambil judul : HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA-TUNISIA PADA TAHUN (1988-2006)

B. TUJUAN PENULISAN

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah yang senantiasa memiliki tujuan penulisan, maka tujuan penulisan ini adalah:

Pertama, penulisan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai upaya-upaya serta peluang-peluang Indonesia-Tunisia dalam mempererat hubungan bilateral dalam bidang perdagangan.

¹ harian Kompas, Tunisia Hadapai Tantangan An-nahdal, senin, 15 November 1993

² <http://www.antaraneews.co.id>. "Kerjasama Indonesia-Tunisia"

Kedua, penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah, serta menambah pemahaman keilmuan secara lebih mendalam.

Ketiga, tujuan yang tidak kalah pentingnya yang secara jujur penulis akui adalah bahwa penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kejarjanaan (Strata I) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan internasional adalah salah satu dari persoalan ekonomi politik internasional yang paling tua dan paling kontroversial. Perdagangan internasional ditentukan oleh struktur produksi ekonomi politik internasional seperti halnya struktur keamanan internasional. Perdagangan juga menghubungkan satu negara dengan negara lain sehingga meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka.

Latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah bahwa setiap negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan warganya, untuk itu mereka mendatangkan barang dari negara lain. Maka terjadilah transaksi barang atau jasa yang menghubungkan antara negara-negara dimana mereka saling membutuhkan.

Integrasi ekonomi pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya diantara negara-negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerjasama.³

Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar di Tunisia sebagai realisasi pembukaan hubungan diplomatik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan Tunisia, dan Presiden RI pertama, Ir Soekarno, mengunjungi Tunisia pada tahun 1956.

Hubungan politik Tunisia-Indonesia sangat baik dan historis karena Indonesia sudah membantu perjuangan rakyat Tunisia sejak tahun 1951, yakni sebelum mereka merdeka. hubungan Indonesia-Tunisia di sektor ekonomi dan perdagangan masih perlu inovasi karena jauhnya jarak antara kedua negara. "Orientasi pengusaha Tunisia lebih banyak ke Eropa dan Amerika karena secara geografis lebih dekat. Sedangkan orientasi pengusaha Indonesia juga banyak ke negara-negara Asia dan Eropa sehingga negara-negara Afrika Utara ini tidak terlalu banyak mendapat perhatian, padahal peluang-peluang bisnis di Tunisia cukup besar."⁴

Tunisia sendiri berambisi ingin menjadikan negaranya seperti Singapura dan Eropa. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan hotel-hotel di Tunisia. Itu baru 50 persen yang jadi, dan 50 persen lagi sedang dibangun. Kesempatan ini akan menjadi peluang untuk pengusaha-pengusaha industri perkayuan kita, restoran, hotel, dan lain-lain.

³ J. Soedrajat Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1992, hal 302

⁴ *Harian Kompas*, senin, 26 April 2004

Menurut pusat statistik Tunisia, statistik perdagangan Tunisia-Indonesia tahun 2002 berjumlah sebesar 27,840 juta dinar Tunis (DT). Impor Tunisia dari Indonesia pada tahun 2002 berjumlah sekitar 19,165 juta DT (US\$\$ 1=1,25 DT-). Sementara itu, statistik perdagangan Tunisia-Indonesia, Januari-November 2003, adalah impor Tunisia dari Indonesia sebesar 19.358.571 DT, sedangkan ekspor Tunisia ke Indonesia sebesar 4.090.470 DT sehingga neraca perdagangan adalah 15.268.101 DT (surplus untuk Indonesia). Komoditas impor Tunisia dari Indonesia meliputi palm oil dan coconut oil, plastik dan produk turunannya, tekstil dan produk tekstil, elektronik, produk kimia, sepatu, houseware, produk laut, khususnya tuna dan cumi. Adapun ekspor Tunisia ke Indonesia meliputi kurma, pupuk, sulfur, fosfat dan turunannya, pulp kayu, dan produk kimia.

Sebagai dampak positif dari pameran tunggal Indonesia di Jeddah pada tanggal 24 Oktober 1982, serta kunjungan misi dagang Indonesia ke Timur Tengah. Delegasi Arab Saudi yang beranggotakan 30 pengusaha besar yang dipimpin oleh Ismail Ali Abu Dawood dan delegasi dari Tunisia sebanyak 50 pengusaha yang akan tiba di Jakarta dalam rangka untuk mengadakan pertemuan dan kontak dagang trilateral dengan para pengusaha Indonesia yang telah ikut dalam pameran tunggal Indonesia di Jeddah.

Indonesia menyiapkan berbagai kerjasama yang antara lain, kemudahan dalam mengekspor dan penghindaran pajak berganda. Indonesia berharap dengan hubungan perdagangan trilateral ini komoditi Indonesia yang akan masuk ke Timur Tengah dan Afrika Utara mendapatkan kemudahan dan ini akan menjadi dampak positif dalam

perkembangan perdagangan internasional Indonesia. Dalam pertemuan tersebut para delegasi menyaksikan mini display berbagai jenis produk yang potensial untuk pasar Arab Saudi dan Tunisia.⁵

Kesepakatan kerjasama Indonesia-Tunisia (tabel 1.1)

1983	Persetujuan perdagangan
1984	Persetujuan bidang informasi
2001	Promosi bidang perdagangan
2004	Pelaksanaan Indonesia-Tunisia (partnership day)
2006	Kerjasama Otorita Batan dengan Bizerte Economic Park

Sumber: Kedutaan Besar Republik Tunisia

D. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari penjelasan dan uraian di atas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut : “Mengapa Hubungan Perdagangan Indonesia-Tunisia pada tahun 1988-2006 meningkat”?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat Bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan untuk menganalisa permasalahan ini merupakan penjelasan yang lebih terdiri dari

sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu guna mengambil suatu hipotesa.

Teori Perdagangan Internasional

Menurut Byrns. Stone :

“The exchange of goods and services across national boundaries is called international trade.”⁶

Teori perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Teori klasik yang umum dikenal adalah teori keunggulan absolute dari Adam Smith, teori Keunggulan Relatif atau Keunggulan Komparatif dari J.S Mill, dan teori biaya relative dari David Ricardo, sedangkan teori factor proporsi dari Heckscker dan Ohlin di buku-buku teks ekonomi internasional disebut sebagai teori modern.

Teori dasar yang mengenai keuntungan komparatif yang menjadi pangkal tolak pertukaran barang dan jasa disebut dengan teori keuntungan komparatif Ricardo.⁷ Teori modern dalam perdagangan internasional dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dalam bukunya “Interregional and International Trade” yang sebagian dari padanya didasarkan atas tulisan gurunya, Eli Heckscher, yang dituliskannya pada tahun 1919. karena Heckscker menulis artikelnya di Swedia, maka

⁶ Byrns. Stone, *Economics*, (Unitade States of America : Scott, Foresman and Company, 1984)

⁷ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional Jilid 2; Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), h. 259

dunia luar baru mengenal konsepnya setelah dikemukakan oleh Ohlin. Dengan demikian pionir teori modern dalam perdagangan internasional dikenal sebagai Heckscher dan Ohlin. Untuk selanjutnya teori mereka akan kita sebut teori Heckscher-Ohlin atau teori H-O. Jadi Teori Faktor Proporsi (teori H-O) menyatakan bahwa :

- a. *Sesuatu negara akan/sebaliknya menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak (banyak dalam arti bahwa harga relatif faktor produksi itu relatif murah), sehingga barang-barang itu relatif murah karena ongkos produksinya relative murah.*
- b. *Dengan mengutamakan produksi dan ekspornya pada barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, maka harga faktor produksi yang relatif banyak itu akan naik.*

Perkembangan ekspor dari suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif tetapi juga oleh faktor-faktor keunggulan kompetitif. Keunggulan suatu negara di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif (teori-teori klasik dan H-O) yang dimilikinya dan juga karena adanya proteksi atau bantuan fasilitas dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Perbedaan lain dengan keunggulan komparatif adalah bahwa keunggulan kompetitif sifatnya

lebih dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi dan SDM, yang sangat cepat.⁸

Perdagangan Internasional merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan interdependensi antar negara, tanpa banyak menghiraukan perbedaan politik diantara mereka. Pada tingkat yang paling sederhana, suatu negara akan mengimpor komoditas yang tidak dihasilkannya dan mengekspor komoditasnya yang melebihi kebutuhan pasar domestik.

Intedependensi di lingkungan perdagangan, jauh dari hanya sekedar pertukaran barang dan jasa karena adanya sejumlah unit yang diperdagangkan bila pihak-pihak yang terkait menyepakati nilai relatif dari kedua komoditi tersebut.⁹ Dan dengan tidak adanya spesialisasi penuh dari suatu barang yang diperdagangkan maka akan merubah jumlah barang yang diproduksi oleh suatu negara.

Perdagangan Internasional dilakukan diantara beberapa negara yang saling membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap negara melakukan pengawasan dari perdagangan internasional tersebut dengan cara yang bervariasi disertai aturan-aturan perdagangan yang berbeda-beda.¹⁰ Dalam konteks modern, teori perdagangan internasional dimulai dengan sebuah pertanyaan : Mengapa hubungan perdagangan antar negara dilakukan, meskipun suatu negara menghasilkan

⁸Tulus. TH. Tambunan *Transformasi Ekonomi di Indonesia : teori dan penemuan empiris*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001)

⁹ Walter S Jones, *Logika HI 2 Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, (Gramedia Pustaka Utama) h. 249

¹⁰

produk tertentu dalam negeri, masih harus mengimpornya dari negara lain, mengapa perdagangan internasional terjadi?

Perdagangan Internasional terjadi karena masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya merasa memperoleh manfaat dari adanya perdagangan tersebut. Dengan demikian perdagangan tidak lain adalah kelanjutan atau bentuk yang lebih maju dari pertukaran yang didasarkan atas kesukarelaan masing-masing pihak yang terlibat.

Kegiatan impor pada akhirnya akan mengurangi lapangan kerja domestik dan tingkat permintaan bagi produksi domestik. Melampaui titik tertentu pertumbuhan impor dapat mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan atau bahkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan domestik dan melenyapkan kesempatan kerja di seluruh sektor yang terkait, sehingga dijumpai tuntutan agar pemerintah melindungi industri domestik dengan membatasi produksi impor tertentu, atau memberlakukan tarif yang tinggi (bea masuk) terhadapnya agar menjadi lebih mahal dari produk domestik yang sama.

Bagi Tunisia Politik Luar Negeri berpegang pada prinsip politik non-blok, menolak eksrimisme agama dan terorisme, bersikap moderat dan pragmatis, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Tunisia mengusahakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan pada masa Presiden Habib Bourguiba yang mengutamakan hubungan dengan negara-negara Barat (terutama dengan Amerika dan Perancis) sedangkan Presiden Ben Ali cenderung

menitik beratkan hubungan internasionalnya dengan negara-negara Arab lainnya, sekalipun tetap menjalin hubungan erat dengan negara-negara Barat. Indonesia merupakan mitra dagang terpenting Tunisia di Asia Tenggara dengan volume perdagangan bilateral mencapai 28 juta dinar Tunisia (berkisar 19,6 juta euro, 22,5 juta dolar AS) tahun 2002.

Pemerintah Indonesia dengan Tunisia sepakat saling mengembangkan dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Hal ini di realisasikan dengan adanya penandatanganan lima perjanjian atau MoU. Kelima perjanjian itu adalah kesepakatan mengembangkan industri di kawasan otorita Batam atau Batam Industrial Development Authority (Bida) serta Zarzis Park di Tunisia, kesepakatan budaya, pembebasan visa masuk bagi para diplomat dan tugas kedinasan, serta kesepakatan bidang reproduksi dan keluarga berencana.¹¹

Bagi Tunisia, kerjasama dengan Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena Tunisia memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 28-11-1983. perjanjian tersebut akan sangat membantu diantara kedua negara untuk mengembangkan perekonomian, memberikan keuntungan devisa negara dan tujuan untuk mendapatkan kepentingan nasional masing-masing negara.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor

¹¹ <http://www.kompas.com>, Sabtu, 22 November 2006

penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian kajian ilmu ekonomi internasional yang menitik beratkan pada transaksi-transaksi riil antar penduduk suatu negara dengan negara lain. Transaksi riil ini antara lain meliputi pergerakan barang secara fisik atau suatu komitmen atas sumber daya ekonomi yang tampak (*a tangible commitment of economic resource*).¹²

Hubungan baik kedua negara tercermin dari adanya perhatian pemerintah dan rakyat Tunisia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu simpati dan solidaritas pemerintah dan rakyat Tunisia kepada Pemerintah Indonesia dalam musibah bencana alam Tsunami bulan Desember 2004 di Aceh dan Nias dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, obat-obatan, selimut dan tenda.

Dalam musibah jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan bulan September 2005, Pemerintah dan Rakyat Tunisia telah menyampaikan simpati dan rasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah Tunisia juga telah menyampaikan simpati dan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana gempa bumi di Yogyakarta bulan Mei 2006.

¹² D. B. K. ...

Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan internasional, sudah sewajarnya setiap negara mempunyai suatu untuk kepentingan nasionalnya dan demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Strategi perdagangan nasional merupakan suatu kebijakan atau keputusan pemerintah dibidang ekonomi perdagangan internasional yang mengandung unsur “tepat guna”.

Teori Bilateral Trade

Menurut Jack C. Plano and Roy Olton :

Kesepakatan dua negara untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi persetujuan ekonomi bilateral dapat berbentuk “clearing arrangement” sehingga pembayaran untuk barang ekspor dan impor dilakukan melalui sebuah rekening bank, atau dalam bentuk kesepakatan pembayaran yang mencakup seluruh transaksi keuangan kedua negara. Dalam bentuk yang paling sederhana, perjanjian bilateral mencakup kesepakatan barter dan dengan kesepakatan tersebut pertukaran barang dari kedua negara dalam jumlah tertentu dilakukan tanpa mempergunakan valuta asing.¹³

Bilateralisme ekonomi yang paling umum dipakai adalah dalam bentuk perjanjian perdagangan dengan saling mengurangi bea tarif masuk dan rintangan dan rintangan perdagangan lainnya. Kesepakatan antar pemerintah untuk bertukar barang.

¹³ - - - - -

Berdasarkan persetujuan barter, jumlah barang yang ditukar sesuai dengan tingkat yang disepakati tanpa transaksi keuangan. Kesepakatan barter terjadi karena untuk mengatasi masalah devisa yang mengganggu perdagangan luar negeri.

Perjanjian bilateral memainkan peran penting dalam memajukan perdagangan antar bangsa pada masa nasionalisme dibidang ekonomi. Perjanjian seperti ini terbukti sangat berguna dalam mengatasi kebijaksanaan “restriktif” nasional yang mencakup pengawasan devisa, tariff, dan kuota selain dipergunakan untuk mengendalikan perdagangan kearah pencapaian tujuan politik.

Perjanjian bilateral cenderung menjadi kesepakatan istimewa dan dengan sangat alamiah bersikap diskriminasi terhadap bangsa lain, sehingga kerap mengundang pembalasan serupa. Pencantuman perlakuan *most Favored Nation* dalam perjanjian bilateral seperti dicantumkan di dalam program perjanjian perdagangan timbal balik serta dalam kerangka GATT dapat menghilangkan dampak diskriminasi. Melalui cara seperti ini mereka berperan serta untuk menumbuhkan sistem perdagangan multilateral yang lebih bebas daripada mendorong terjadinya diskriminasi perdagangan. negara komunis mempergunakan perjanjian bilateral dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara berkembang. Mereka memberikan kredit jangka panjang dalam bantuan teknik, barang modal, dan perlengkapan militer yang hanya dikawatirkan oleh negara penerima bantuan dengan mengizinkan barang

Teori Keunggulan (Comparative Advantage)

Teori tentang komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam teorinya bahwa perdagangan internasional akan tetap menguntungkan oleh kedua belah pihak meskipun salah satu negara bekerja efisien dibanding mitra dagangnya. Suatu negara hendaknya menspesialisasikan pada produk yang memiliki keunggulan komparatif. Penekanannya pada *labor cost* dibanding faktor produksi lainnya.

Suatu negara yang telah maju teknologinya mungkin saja memiliki kemampuan lebih efisien dalam memproduksi setiap barang bila dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Ini berarti negara maju dengan negara sedang berkembang tidak memiliki keunggulan absolut apapun. Akan tetapi selama perbedaan relatif dalam memproduksi barang yang berbeda di kedua negara tersebut, dapat dipastikan setiap negara bahkan dengan negara miskin teknologi yang masih rendah akan memiliki keunggulan relatif dalam memproduksi barang-barang tertentu. Demikian juga dengan negara maju yang dapat bekerja dengan efisien akan lebih menguntungkan bila hanya menspesialisasikan pada produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan mengimpor produk-produk yang tidak memiliki keunggulan.

F. HIPOTESA

Berangkat dari perumusan masalah dan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut : Pelaksanaan Hubungan Perdagangan Indonesia-Tunisia pada tahun (1999-2006) mengalami peningkatan karena di dukung oleh faktor .

1. Adanya unsur saling melengkapi atau menguntungkan dalam memasok barang-barang komoditi produk lokal kedua belah pihak.
2. Indonesia Sebagai Pemasok Barang Bahan Baku ke Tunisia
3. Tunisia Membuka Peluang bagi Indonesia ke Pasar Eropa
4. Kerjasama pengusaha Indonesia-Tunisia

G. JANGKAUAN PENULISAN

Tanpa pembatasan masalah dalam suatu penulisan ilmiah dapat menggelincirkan pokok bahasan menjadi meluas. Oleh sebab itu diperlukan batasan dengan mengadakan jangkauan penulisan.

Berdasarkan hal diatas, penulis perlu membatasi tulisan tentang peluang hubungan bilateral Indonesia-Tunisia pada tahun 1988-2006, hanya pada bidang perdagangan yang membahas berbagai pelaksanaan hubungan perdagangan di antara kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada data yang diambil dari bidang lainnya untuk mendukung penulisan.

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data ini akan dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari

literature-literatur, majalah-majalah, surat kabar, maupun dokumen dan laporan-laporan resmi baik yang diterbitkan atau tidak, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan acuan dan membantu bahan dalam karya tulis ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini maka sangat perlu kami buat sistematika penulisan yang telah kami rencanakan sebagai berikut:

- Bab I Pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- Bab II Dalam bab ini penulis memberi bahasan mengenai kondisi hubungan Indonesia-Tunisia dalam bidang politik, sosial budaya dan penerangan, dukungan Indonesia kepada Tunisia dalam memperoleh kemerdekaan dari Perancis serta bahasan mengenai Tunisia Pada Era Presiden Habib Bourguiba dan Presiden Zine El Abidine Ben Ali.
- Bab III Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai terobosan yang dilakukan Indonesia-Tunisia yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara, hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Tunisia, peranan

kerjasama perdagangan Tunisia dengan Indonesia, perkembangan ekspor-impor Indonesia, kondisi perdagangan internasional Indonesia dan perdagangan luar negeri Tunisia.

Bab IV Menjelaskan pelaksanaan hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Tunisia yang saling melengkapi dan menguntungkan untuk memajukan perdagangan bagi pembangunan nasional Indonesia-Tunisia, serta perjanjian bilateral sebagai peran pendukung pelaksanaan hubungan perdagangan ke dua negara.

Bab V Akan menelaah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan